

**PELANGGARAN ETIK POLITIK DALAM KASUS
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI
(PILBUP) DI DAERAH SUMATERA UTARA TAHUN 2020**

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas



Oleh:

ALWI SAPUTRA

2420831004

Pembimbing:

- 1. Dr. Aidinil Zetra, MA**
- 2. Dr. Doni Hendrik, M.Soc.sc**

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

ABSTRAK**Nama : Alwi Saputra****Program Studi : Magister Ilmu Politik****Judul : Pelanggaran Etik Politik Dalam Kasus Pemungutan Suara
Uleng Pemilihan Bupati (Pilbup) Di Daerah Sumatera Utara Tahun 2020**

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 di Sumatera Utara ditemukan pelanggaran etik Pemilu. Pelanggaran yang ditemukan adalah Kasus penggelembungan suara oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Madina. Penyebab PSU di Kabupaten Labuhan Batu dan Labusel karena kelalaian KPPS saat bertugas dan manipulasi data pemilih oleh petugas KPPS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tindak pragmatisme paslon dan pola transaksionalisme politik yang menyebabkan PSU dalam kasus pelaksanaan Pilkada serentak di Sumut Tahun 2020. Teori yang peneliti gunakan adalah pragmatisme politik yang kemudian dihubungkan dengan politik transaksional. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam proses malpraktek Pemilu yang terjadi saat Pilkada Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2020, 3 daerah di atas memiliki motif dan karakternya masing-masing. Hasil temuan di Kabupaten Madina adalah bahwa petugas KPPS menjadi aktor malpraktek Pemilu atas dasar kepentingan praktis. Transaksionalisme politik di Kabupaten Madina berhasil merubah pola dukungan masyarakat dengan memilih kandidat dengan jumlah uang paling besar. Di Kabupaten Labusel, peneliti menemukan bahwa pragmatisme politik hanya sekedar untuk kepentingan pribadi pemilih, bukan dengan tujuan memenangkan paslon. Kondisi sosial ekonomi justru menjadikan pemilih yang apatis di Kabupaten Labusel. Transaksionalisme politik menjadi hal yang wajib, namun hanya sekedar upah untuk memberikan hak suara, tanpa usaha memenangkan paslon tertentu. Di Kabupaten Labuhan Batu, pragmatisme politik sangat terstruktur dan masif, serta adanya usaha membangun relasi kuasa oleh paslon. Politik transaksional lebih kuat dibanding relasi kuasa yang dibangun kandidat, karena terbukti paslon dengan jumlah uang lebih besar berhasil memenangkan Pilkada, bahkan di daerah yang menjadi basis tim lawan.

Kata kunci : Pragmatisme, Transaksionalisme, Malpraktek Pemilu

ABSTRACT**Nama** : Alwi Saputra**Program Studi** : Magister Ilmu Politik**Judul** : *Violations of Political Ethics in the Case of the Re-vote for the 2020 Regent Election (Pilbup) in North Sumatra.*

During the 2020 simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) in North Sumatra, several electoral ethics violations were identified. Notably, there was a case of vote inflation by the Voting Committee Group (KPPS) in Mandailing Natal Regency. The causes of the re-voting (PSU) in Labuhan Batu and Labusel Regencies were due to KPPS negligence during duty and manipulation of voter data by KPPS officers. This study aims to describe and explain the pragmatic actions of candidates and the patterns of political transactionalism that led to the PSU cases during the 2020 Pilkada in North Sumatra. The theoretical framework applied in this study is political pragmatism, which is then linked to transactional politics. The study uses a qualitative approach with a case study method. Informants were selected through purposive sampling, and data were collected via interviews and documentation. The findings indicate that the electoral malpractice that occurred in these three regions exhibited distinct motives and characteristics. In Mandailing Natal, KPPS officers became actors of electoral malpractice driven by practical interests. Political transactionalism in Mandailing Natal successfully altered public support patterns, with voters favoring candidates offering the largest sums of money. In Labusel, political pragmatism was limited to the personal interests of voters, without the aim of winning a particular candidate. Socioeconomic conditions contributed to voter apathy, and transactional politics occurred merely as compensation for casting a vote, without any effort to secure a candidate's victory. In Labuhan Batu, political pragmatism was highly structured and massive, accompanied by efforts by candidates to build power relations. Nevertheless, transactional politics proved stronger than the power relations established by candidates, as those offering larger amounts of money succeeded in winning the Pilkada, even in regions that were strongholds of opposing teams.

Keywords: Pragmatism, Transactionalism, Election Malpractice